

## **BAB I**

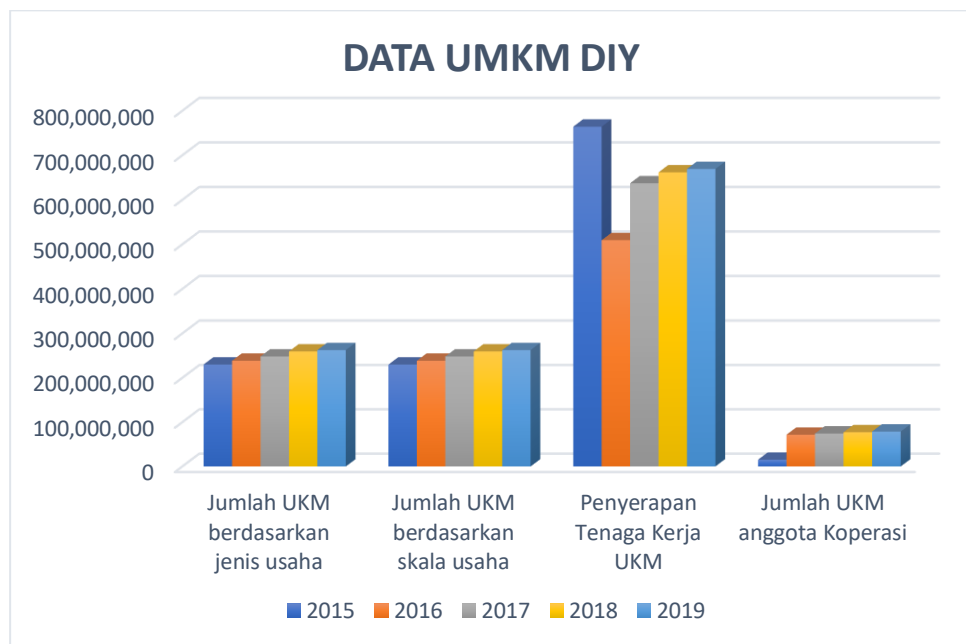
### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini menjadi salah satu harapan bangsa yaitu sebagai penggerak perekonomian rakyat Indonesia dan mampu mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran yang ada. Berdasarkan dengan data yang ada pada Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2017 ada sekitar 62,9 juta UMKM atau bisa diperkirakan sekitar 99,99% dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Unit-unit UMKM tersebut mampu menampung pekerja sebanyak 116,6 juta orang pekerja atau setidaknya ada sekitar 97,02% dari total keseluruhan pekerja yang ada Indonesia.

Dari data tersebut maka sudah jelas bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar untuk perekonomian Indonesia. Dengan adanya kontribusi yang besar ini maka seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih untuk mengembangkan serta mempertahankan potensi dari UMKM di Indonesia. Sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki perkembangan UMKM yang dari tahun ketahunnya mengalami kenaikan, kenaikan ini bisa kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Yang mana berdasarkan dari data tersebut mengatakan bahwa untuk tahun 2015 jumlah

UMKM di DIY mencapai 230.047.000. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 220.703.000 maka terdapat perbedaan sekitar 10.000. (bappeda.jogja.go.id/dataku/data\_dasar?id\_skpd=18)



Sumber: Bappeda, 2019, diolah

**Gambar 1.1**  
**DATA UMKM DI Yogyakarta 2019**

Dalam perkembangannya Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) terdapat penghambat yang mempengaruhinya, salah satunya ialah minimnya akses dari permodalan atau pembiayaan. Sedangkan dalam proses melakukan pembiayaan mereka harus dapat meyakinkan Bank bahwa usaha yang mereka jalankan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk bisa dikatakan layak mendapatkan pembiayaan maka UMKM harus dapat meyakinkan bank bahwa usaha yang mereka jalankan itu

menguntungkan dan dapat beroperasi dengan baik, sehingga dapat mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Untuk dapat meyakinkan hal tersebut maka UMKM harus menunjukkan bukti catatan keuangan atau laporan keuangan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, Namun seperti yang sudah kita ketahui bahwa masih banyak sekali UMKM yang tidak melakukan pelaporan keuangannya. Para pelaku UMKM masih beranggapan bahwa pelaporan keuangan merupakan hal yang rumit untuk dijalankan dan mereka masih merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan pelaporan. Bagi sebagian pelaku UMKM pelaporan keuangan tidak dibutuhkan karena ukuran usaha yang mereka jalankan masih kecil. Padahal dengan melakukan pelaporan keuangan maka akan mempermudah pemilik dalam mengetahui posisi keuangan kinerja dari perusahaan secara akurat dan juga relevan. Hal ini didukung dengan jogjapolitan yang menyatakan bahwa salah satu hambatan dari UMKM yaitu kesulitan dalam mengakses modal permodalan dari lembaga kredit formal. Lantaran kini sudah banyak pembiayaan UMKM tanpa angunan, namun salah satu faktor yang menjadi penghambat yakni masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki laporan keuangan usaha. Padahal pembukuan memiliki peranan yang penting untuk mengontrol pertumbuhan serta perkembangan usaha, pengendali keuangan usaha dan pertanggungjawaban pengelola usaha. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (KUKMP) bantul, Sulistyanta mengakui kebanyakan pelaku UMKM masih mengandalkan ingatan untuk

menghitung berapa banyak uang yang dibelanjakan atau hasil perolehan penjualannya. Disini Direktur BPR Bank Bantul, Heri Susanto juga memeparkan sebagian besar UMKM tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, padahal kemampuan mengelola keuangan pribadi atau keluarga berpengaruh pada pengelolaan keuangan usaha. Dan pengelolaan keuangan merupakan aspek yang penting bagi usaha. ([UMKM Kesulitan Susun Laporan Keuangan - Harianjogja.com](#)).

Badan Ekonomi kreatif (Bekraf) menyebutkan masih banyak UMKM yang belum mampu untuk menyusun laporan keuangan dan ini mengakibatkan UMKM belum mampu untuk mengakses permodalan dari perbankan. Kepala Sub Direktorat Perbankan Syariah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Yuke Sri Rahayu mengatakan, meski belum terdata secara pasti UMKM yang telah mampu menyusun laporan keuangan, setiap kali mereka menggelar pelatihan terhadap UMKM, hanya 20% yang mampu menyusunnya. Itupun masih dilakukan secara manual dan belum digital sesuai harapan ([80% UMKM Belum Mampu Susun Laporan Keuangan - Tribunjogja.com \(tribunnews.com\)](#)).

**Tabel 1.1**

**Data Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT NITEN selama Triwulan  
September-Oktober 2019**

<b>Pembiayaan</b>	<b>Jumlah</b>
Mudharabah	147 orang
Musyarakah	Tidak ada
Murabahah	50 orang
Ijarah	2 orang

Jika melihat data yang saya dapatkan dari Kepala Bagian Operasional KSPPS BMT NITEN diatas maka dapat dilihat bahwa banyak nasabah UMKM di KSPPS BMT Niti Tentrem Nugraha (NITEN) sendiri menggunakan akad mudharabah dalam melakukan pembiayaan, ini dikarenakan akad mudharabah merupakan akad kerja sama yang dilakukan antara dua pihak yakni, pihak pertama (*shahibul maal*) yang bertindak sebagai penyedia seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dibagi menurut dengan kesepakatan dua belah pihak. Dalam akad mudharabah diperlukan beberapa syarat, yang mana salah satu syarat tersebut adalah diperlukannya pelaporan keuangannya untuk membuktikan kepada pihak bank bahwa usaha mereka menguntungkan, berjalan dengan baik dan juga layak (Anan dan Moch. Dzulkirom, 2015).

Pada kenyataannya seperti apa yang saya dapatkan melalui wawancara dengan Ibu Nenek Dwi Listiyana, S.E. sebagai Kepala bagian Operasional di KSPPS BMT NITEN bahwa masih terdapat sekitar 90%

nasabah UMKM di KSPPS BMT Niti Tentrem Nugraha (NITEN) yang tidak melakukan pelaporan keuangannya sehingga BMT mengalami kesulitan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan. BMT melakukan analisis kelayakan dalam melakukan pembiayaan hanya dengan menggunakan tabungan dari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tidak menggunakan laporan keuangan dari nasabah jadi, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT NITEN diharuskan memiliki tabungan sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian yang sebelumnya dijelaskan bahwa kendala-kendala yang dialami oleh para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah meliputi latar belakang pendidikan pemilik usaha, Teknologi informasi, omzet penjualan, umur dari usaha, serta kurang efektifnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya melakukan pelaporan keuangan (Novi dan Sulistiningsih, 2018). Selain itu ukuran usaha juga menjadi faktor bisa menimbulkan persepsi dari pelaku UMKM mengenai pentingnya melakukan pelaporan keuangan. Semakin besar usaha seseorang maka akan semakin besar pula tingkat transaksi usaha dari suatu UMKM, sehingga pemilik usaha tersebut akan merasa terdorong untuk melaksanakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan (Gray, 2016). Lamanya suatu usaha yang dijalankan juga beriringan dengan ukuran usaha. Semakin lama suatu usaha tersebut berjalan maka akan semakin membuat pemilik usaha untuk menjalankan pembukuan atau pelaporan keuangan. Hubungan antara umur usaha dengan frekuensi melakukan pelaporan

keuangan dengan teratur maka akan menyebabkan suatu usaha akan berumur panjang (Das dan Dey, 2005).

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Niti Tentrem Nugraha (NITEN) yang berlokasi Jl. Bantul No. KM. 6, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. KSPPS BMT Niti Tentrem Nugraha atau biasa dikenal dengan BMT NITEN yang berdiri pada tahun 2002 di Nyemengan, Tirtonirmolo sudah lebih dari 19 Tahun menjalankan aktivitasnya dalam Koperasi Simpan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah, yang menjadikan BMT Niten mempunyai potensi dalam mengajukan pinjaman modal kepada nasabah adalah karena lokasi nya yang sangat strategis sehingga dalam perekonomiannya memiliki tingkat yang cukup besar. BMT NITEN mampu dalam memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian dalam sektor UMKM Bantul (<http://www.bmntitenbantul.blogspot.com>, 2017)

Berdasarkan dengan apa yang terjadi diatas, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat UMKM dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Dengan melihat keterkaitan tersebut maka mendasari untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengagkat judul **“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UMKM DALAM MELAKUKAN PELAPORAN KEUANGAN”**.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apa saja faktor penghambat Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dalam pembuatan Laporan Keuangan?
2. Bagaimana persepsi pemilik Usaha Kecil, Mikro dan Menengah mengenai pelaporan keuangan?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dalam pembuatan Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi pemilik Usaha Kecil, Mikro dan Menengah mengenai pelaporan keuangan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan peran terhadap pengembangan pelaporan keuangan pada nasabah UMKM di KSPPS BMT NITEN.
- b. Mengetahui gambaran secara umum isi informasi keuangan pada UMKM.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana penerapan laporan keuangan serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaporan keuangan pada nasabah UMKM di KSPPS BMT NITEN.



b. Bagi Lembaga Keuangan KSPPS BMT Niti Tentrem Nugraha

Memberikan informasi kepada pihak pengelola lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan usaha dan kualitas kinerjanya dalam memasarkan KSPPS BMT NITEN pada masyarakat dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

c. Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaporan keuangan pada UMKM agar UMKM memahami pentingnya melakukan pelaporan keuangan bagi usahanya.

d. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dalam dunia bisnis dan masyarakat luas untuk bisa mengetahui adanya sesuatu lembaga keuangan syariah yang dapat melayani nasabah khususnya para pedagang kecil yang membutuhkan modal dan sebagai landasan dalam keperluan penelitian.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan memberikan pembahasan supaya memudahkan penelitian dan pembaca dalam memahami secara keseluruhan bahasa dalam penelitian ini. Oleh sebab itu sistematika pembahasan penelitian antara lain, sebagai berikut:

## **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan berisikan mengenai pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta sistematika pembahasan.

## **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Pada bagian ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka terdahulu serta kerangka teori yang relevan dan saling berkaitan dengan tema skripsi berupa jurnal dan buku.

## **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini akan berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan di lakukan penulis yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi.

## **4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan membahas mengenai sistematika penyajian dari hasil dari penelitian yang sudah disusun berdasarkan dengan apa yang disampaikan pada 3 BAB bagian faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi UMKM dalam melakukan pelaporan keuangan serta persepsi pemilik usaha UMKM mengenai pelaporan keuangan

## **5. BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini akan berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran serta rekomendasi dari penulis.